

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTIAN
PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP SIKAP
MASYARAKAT DI DUSUN XV DESA BANDAR AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

YESI SURYANTI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTIAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP SIKAP MASYARAKAT DI DUSUN XV DESA BANDAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Yesi Suryanti

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan sampel 33 responden. Menggunakan teknik pengumpulan data angket skala likert, wawancara, dokumentasi dan observasi serta analisis data menggunakan *chi kuadrat*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi $C = 0,73$ dan koefisien kontigensi maksimum $C_{\max} = 0,82$ berada pada kategori tinggi dengan jarak interval 0,56-0,82. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah tentang penghentian tenaga kerja Indonesia terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan tentang penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia berpengaruh terhadap sikap masyarakat yang cenderung menolak, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak paham tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut, selain itu masyarakat juga masih berniat ingin menjadi TKI. Berdasarkan beberapa indikator mengenai kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI dan sikap masyarakat yang meliputi indikator mendukung kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI cenderung tidak setuju, indikator menolak kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI cenderung setuju, indikator kognisi sikap masyarakat cenderung tidak setuju, indikator afeksi cenderung netral dan indikator konasi cenderung netral.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, sikap masyarakat, TKI

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTIAN
PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP SIKAP
MASYARAKAT DI DUSUN XV DESA BANDAR AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh
YESI SURYANTI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pendidikan**

Pada

**Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTIAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP SIKAP MASYARAKAT DI DUSUN XV DESA BANDAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Yesi Suryanti**

No. Pokok Mahasiswa : **1313032095**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

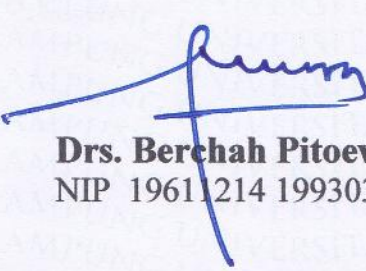
Jurusan : **Pendidikan IPS**

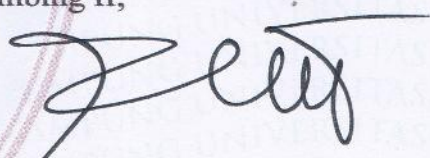
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

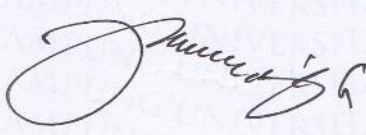

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

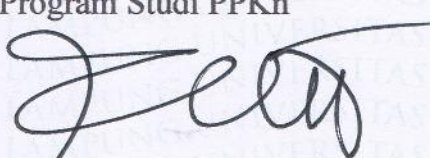

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

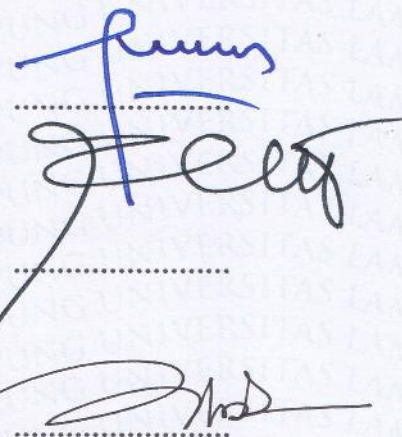
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

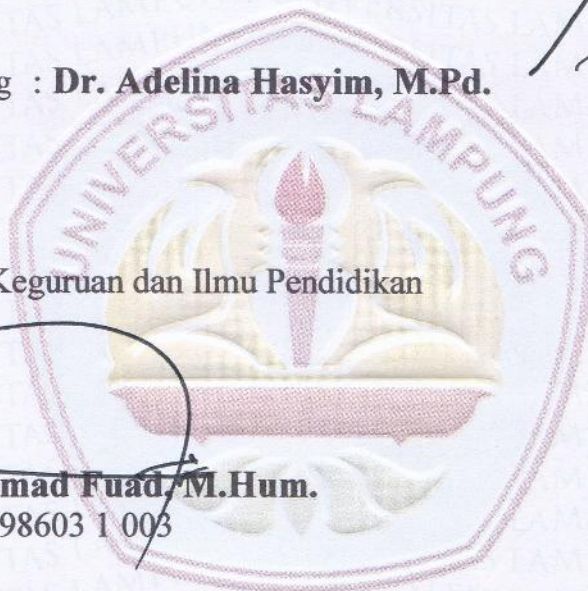
Sekretaris : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Februari 2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Yesi Suryanti
NPM : 1313032095
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Dsn. XV, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono,
Kab. Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis,



Yesi Suryanti
NPM 1313032095

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Agung pada tanggal 2 juni 1995. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sumanto dan Ibu Omsini.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Bandar Agung pada tahun 2007, kemudian Sekolah Menengah Pertama Paguyuban Bandar Sribawono tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribawono pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mendapat beasiswa bidikmisi. Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di jurusan yaitu HIMAPIS periode 2014 – 2015 dan FORDIKA. Pada Juli 2016 penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) dan program pengalaman lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT,
kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku
kepada:*

*Ayah tercinta Bapak Sumanto dan Ibunda tersayang Ibu
Omsini yang telah membesarkanku dengan penuh kasih
sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik,
membimbing, memberikan semangat dan senantiasa berdoa
demí keberhasilanku*

Almamater tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

*“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan
mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan
rezeki yang banyak.”
(Qs. An -Nisaa:100)*

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur”**. Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Didalam penulisan ini penulis banyak menghadapi kesulitan hingga menuju tahap penyelesaian. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Hermi Yanzi, S.Pd, M.Pd., selaku Pembimbing II dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik, terimakasih atas pengarahan dan bimbingan.

Ucapan terimakasih juga kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung FKIP Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian FKIP Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial FKIP Universitas Lampung;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
7. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn, Kak Elisa Septriana S.Pd, serta kakak tingkat 2012 yang telah membantu dan memberi semangat;
8. Bapak Hendri Siswoyo selaku Kepala Desa Bandar Agung yang telah membantu meneliti;
9. Masyarakat Desa Bandar Agung, khususnya Dusun XV yang telah bersedia menjadi responden;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluargaku terima kasih atas doa, senyum, air mata, bahagia, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan untukku yang tiada pernah dinilai dengan segi apapun;

11. Seluruh kerabat yang telah mendoakan kesuksesanku kelak;
12. Sahabat terbaik Endang Sri Lestari, Ersya Susanti, Triana Desita Sari, Elin Eliawati, dan Shinta Ronauli Sitinjak, Prayitno, dan M. Ardiansyah yang selalu ada disaat susah maupun senang, yang selalu menasihati dan memberi motivasi saat aku mulai mengeluh dalam segala hal;
13. Sahabat tercinta Ana, Indah, Wulan, Puspita, Ifa, Asni dan Isma yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam segala hal;
14. Sahabat terkasih Lulu, Dila, Diyah, Rian Diasti, Ira dan Kanti yang selalu memberiku motivasi untuk terus memperbaiki diri;
15. Teman-temanku, Wiji Riyani, Linda Wati, Aina Fayanti, Nur Anita, Heni Istiani, Atika Febtiana, Atika Dwi Lestari, Kurnia Nurkaromah, Evi Susanti, Azmi Fikron, Trio Saputra, Siti Khotijah serta seluruh teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn khususnya angkatan 2013 yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, saran, dukungan serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepadaku;
16. Adik tingkat 2014, 2015 dan 2016 yang selalu setia saat dibutuhkan.
17. Teman-teman KKN-PPK di Desa Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung yang memberi semangat dan canda tawa dalam kebersamaan selama ini untuk meraih kesuksesan;
18. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terima kasih atas segala kebaikannya dan semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas kebaikan itu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis

Yesi Suryanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis	10
1.7 Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	11
2. Subjek Penelitian	12
3. Objek Penelitian	12
4. Tempat Penelitian.....	12
5. Waktu Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Deskripsi Teori	13
2.1.1 Tinjauan Tentang Kebijakan.....	13
a. Pengertian Kebijakan	13
b. Teori Pengambilan Keputusan	16
c. Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman TKI (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik	

	Indonesia Nomor 260 Tahun 2015)	21
2.1.2	Tinjauan Tentang Tenaga Kerja,Tenaga Kerja Indonesia Serta Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia	24
	a. Pengertian Tenaga Kerja.....	24
	b. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	24
	c. Hak dan Kewajiban TKI dan Calon TKI	26
	d. Syarat Menjadi TKI	27
	e. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)Terhadap Tenaga Kerja Indonesia	30
2.1.3	Tinjauan Tentang Sikap.....	34
	a. Pengertian Sikap	34
	b. Komponen Sikap.....	36
	c. Ciri-ciri Sikap.....	37
	d. Fungsi Sikap.....	40
	e. Teori Organisasi Sikap.....	43
	f. Pengukuran Sikap	45
2.1.4	Tinjauan Tentang Masyarakat.....	47
	a. Pengertian Masyarakat	47
	b. Ciri-ciri Masyarakat	48
2.2	Penelitian yang Relevan.....	50
	1. Lokal	50
	2. Nasional	51
2.3	Kerangka Pikir	52
2.4	Hipotesis	54

III. METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	55
3.2	Populasi dan Sampel.....	56
	A. Populasi	56
	B. Sampel	56
3.3	Variabel Penelitian	58
3.4	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	58
	A. Definisi Konseptual	58
	B. Definisi Operasional	59
3.5	Rencana Pengukuran Variabel.....	60
3.6	Teknik Pengumpulan Data	60
	A. Teknik Pokok.....	60
	B. Teknik Penunjang	62
3.7	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	63
	A. Uji Validitas.....	63
	B. Uji Reliabilitas	63
3.8	Teknik Analisis Data	65

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Langkah-langkah Penelitian	68
	1. Persiapan Pengajuan Judul	68
	2. Penelitian Pendahuluan	69
	3. Pengajuan Rencana Penelitian.....	69

4. Pelaksanaan Penelitian	70
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket	71
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
1. Sejarah Desa Bandar Agung.....	76
2. Keadaan Personil	78
3. Letak Administrasi	78
4. Luas Wilayah dan Keadaan Desa Bandar Agung.....	79
5. Sarana dan Prasarana Desa Bandar Agung	80
4.3 Deskripsi Data	81
1. Pengumpulan Data.....	81
2. Penyajian Data.....	81
a. Penyajian Data Indikator Mendukung.....	82
b. Penyajian Data Indikator Menolak	86
c. Penyajian Data Indikator Kognisi.....	90
d. Penyajian Data Indikator Afeksi.....	94
e. Penyajian Data Indikator Konasi	99
4.4 Pengujian	104
1. Pengujian Pengaruh	104
2. Pengujian tingkat keeratan pengaruh	108
4.5 Pembahasan	110
 V. SIMPULAN	
5.1 Simpulan.....	118
5.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data jumlah TKI berdasarkan tingkat pendidikan periode Januari s/d Agustus tahun 2016 di Dusun XV Desa Bandar Agung	8
3.1 Jumlah Penduduk Dusun XV di Desa Bandar Agung	56
3.2 Distribusi Sampel jumlah penduduk Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.....	57
4.1 Hasil uji coba angket 10 orang diluar responden tentang pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian tenaga kerja Indonesia di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur untuk item ganjil (X)	72
4.2 Hasil uji coba angket 10 orang diluar responden tentang pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian tenaga kerja Indonesia di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur untuk item genap (Y).....	73
4.3 Tabel Kerja Antara Kelompok Item Ganjil (X) dan Kelompok Item Genap (Y).....	74
4.4 Regenerasi pemimpin Desa Bandar Agung sejak awal berdiri sampai saat ini	78
4.5 Sarana dan prasarana yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.....	80
4.6. Distribusi Skor Hasil Angket Tentang Indikator Mendukung	83
4.7. Distribusi Frekuensi Indikator Mendukung	85
4.8. Distribusi Skor Hasil Angket Tentang Indikator Menolak	87
4.9. Distribusi Frekuensi Indikator Menolak	89
4.10. Distribusi Skor Hasil Angket Tentang Indikator Kognisi.....	91
4.11.Distribusi Frekuensi Indikator Kognisi.....	93

4.12. Distribusi Skor Hasil Angket Tentang Indikator Afeksi.....	95
4.13. Distribusi Frekuensi Indikator Afeksi.....	97
4.14. Distribusi Skor Hasil Angket Tentang Indikator Konasi	99
4.15. Distribusi Frekuensi Indikator Konasi	101
4.16. Distribusi Skor Angket Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian TKI di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.....	104
4.17. Kontigensi Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman TKI Terhadap Sikap Masyarakat.....	105
4.18. Kontigensi Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman TKI Terhadap Sikap Masyarakat Konasi	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA.....	120
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	121
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan	122
4. Surat Izin Penelitian	123
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	124
6. Kisi-kisi Angket	125
7. Angket Penelitian	126
8. Distribusi Hasil Angket Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian TKI Terhadap Sikap Masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	131
9. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015	133

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun masih kekurangan tenaga ahli dalam mengolah sumber daya alam tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pun masih kurang. Oleh sebab itu, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga ahli dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara berkembang. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam mengolah sumber daya alam, menjadi penyebab semakin banyaknya pengangguran di negara Indonesia. Hal ini tentu yang menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun tenaga kerja Indonesia itu sendiri bahwa jenis pilihan penyanggah keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi.

Mengenai landasan konstitusional yang menyangkut tentang ketenagakerjaan termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berisi bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya.

Adanya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, tentu akan memberikan peningkatan devisa bagi negara yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Namun, tidak sedikit pula permasalahan-permasalahan yang timbul. Pada umumnya permasalahan yang lazim terjadi adalah menyangkut tentang pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri, khususnya tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan ditempat bekerja, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan atau memperlakukan TKI tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang sering terjadi adalah seputar adanya penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan surat atau dokumen kerja, (TKI ilegal). Tentu saja, hal ini akan menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah Indonesia dengan negara-negara tempat tujuan TKI tersebut dipekerjakan, dan apabila didiamkan sedikit banyaknya akan menimbulkan

terganggunya hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin baik selama ini.

Selain itu, banyak terjadi tindak kejahatan yang menimpa diri TKI seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penganiayaan, pelecehan seksual dan juga pemerkosaan, serta pemotongan gaji oleh majikan. Seperti permasalahan yang dialami para TKI selama beberapa tahun terakhir antara lain: (1) Ruyati, asal Bekasi menjadi tenaga kerja wanita legal sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman. (2) Sumiati, asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKW legal yang baru empat bulan menjadi TKW di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuluh hari setelah kasus dan terungkap ke publik. Akhirnya tersangka dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat. (3) Komalasari, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada 5 November 2010 di Arab Saudi karena disiksa oleh majikan. Setelah satu tahun semenjak meninggal, jenazah baru dipulangkan ke Indonesia. (4) Darsem, TKW legal dari Subang, dituduh membunuh majikan pada 2007 dan dijatuhi hukuman mati. Namun kemudian pada 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar kompensasi senilai dua juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar. (5) Karni binti Medi Tarsim, seorang TKI asal Brebes, Jawa Tengah, dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi pada hari ini, Kamis 16 april 2015 atas kasus pembunuhan anak majikanya yang berusia 4 tahun beberapa tahun lalu.

<http://www.rmola.co.read//2011/07/13/32919/tkw.shtml>

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut, seperti yang secara tegas diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Melihat permasalahan tenaga kerja Indonesia di atas, maka dapat dilihat bahwa pada kenyataannya permasalahan itu lebih banyak bersumber pada masalah dari dalam negeri Indonesia sendiri. Permasalahan TKI, muaranya bersumber dari masalah ekonomi, pemerintahan dan sosial (politik) di dalam negeri.

Masalah ekonomi yang dimaksud adalah bahwa sektor industri yang ada kurang atau belum mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Di samping itu, di tengah kondisi krisis yang tak kunjung mereda, banyak sekali perusahaan yang bangkrut atau terpaksa tutup. Di lain pihak, hampir setiap tahun harga-harga barang kebutuhan masyarakat terus melambung tinggi biasanya seiring dengan naiknya harga-harga BBM (bahan bakar minyak) dan gas. Kondisi ini mendorong para pekerja mencari peruntungan di negeri orang, tanpa memikirkan lagi berbagai risiko yang bisa dialami.

Sementara untuk masalah pemerintahan, masih banyaknya oknum-oknum kotor yang ikut bermain dengan mengambil kesempatan dalam kesempatan demi keuntungan pribadi, semakin memperkeruh masalah TKI hingga berlarut-larut. Apalagi, mengingat sulitnya menertibkan keberadaan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ilegal yang terus saja bisa beroperasi tanpa kontrol. Untuk itulah diperlukan pengaturan yang jelas terkait dengan keberadaan PJTKI-PJTKI ilegal ini. Perangkat hukum yang jelas atas keberadaan perusahaan-perusahaan pengerah jasa tenaga kerja tersebut, mendesak perlu diatur kembali secara transparan.

Munculnya permasalahan TKI tak terlepas dari masalah sosial (politik). Ini terkait dengan tingkat sosial masyarakat di Indonesia, terutama jenjang pendidikannya yang rata-rata masih tergolong rendah. Akibatnya, tingkat pekerjaan yang didapat selama bekerja di luar negeri pun bukan ditingkat pekerjaan profesional. Selain menjadi buruh atau tenaga kasar lainnya, banyak di antara TKI berstatus sebagai pegawai rendahan atau hanya menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Status TKI yang rendah ini mengakibatkan mereka mudah dipermainkan, baik oleh oknum-oknum aparat sebelum pemberangkatan maupun oleh majikan tempat mereka bekerja di luar negeri. Ketika bekerja, hasil yang mereka peroleh pun tergolong sedikit sesuai dengan tingkat pendidikannya yang memang rata-rata rendah.

Melihat permasalahan-permasalahan yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan TKI di luar negeri, bukan semata-mata datang dari TKI itu sendiri tetapi juga melibatkan banyak pihak. Untuk itulah

diperlukan kebijakan atau aturan yang jelas, khususnya dari negara hingga menjadi "aturan umum" yang harus dipatuhi secara bersama. Kebijakan tersebut ialah mengenai penghentian pengiriman TKI ke 19 negara Timur Tengah. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke sejumlah negara di Timur Tengah beberapa tahun lalu. Tetapi, kebijakan itu akhirnya dipermanenkan melalui Surat Keputusan (SK) Menaker yang ditandatangani pada 4 Mei 2015 dan sejak tanggal 26 Mei 2015 pemerintah telah menerbitkan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Dan kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Sesuai dengan isi surat tersebut, pemerintah melarang pengiriman TKI secara permanen ke 19 negara Timur Tengah, yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Jordania.

Kebijakan keras (*hard policy*) itu terpaksa diterapkan bagi negara-negara Timur Tengah karena penerapan budaya/sistem kafalah (*sponsorship*) yang masih kental dimana hak privasi majikan sangat kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan. Selain itu banyak pelanggaran terkait perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan di 19 negara tersebut. Gaji yang rendah hingga tidak adanya perlindungan bagi TKI dalam kebijakan di negara-negara itu yang membuat pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah.

Tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk membenahi sistem perlindungan para pekerja informal di luar negeri. Sehingga, tidak ada lagi TKI yang dihukum mati karena budaya negara setempat yang mempersulit tindakan perlindungan terhadap para pekerja migran yang bekerja pada sektor domestik.

Namun dari kebijakan tersebut akan timbul permasalahan yang lebih kompleks diantaranya angka pengangguran di Indonesia akan meningkat, sementara mayoritas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah sehingga tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti masyarakat Desa Bandar Agung yang berlatar belakang pendidikan yang rata-rata masih rendah sehingga sulit untuk mencari mata pencaharian yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Tingkat pendidikan yang rendah mendorong para penduduk yang memasuki angkatan kerja memilih alternatif mencari lapangan pekerjaan ke luar negeri. Salah satunya di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang memilih alternatif mencari pekerjaan ke luar negeri demi memenuhi kebutuhannya, tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Berikut ini adalah data jumlah TKI berdasarkan tingkat pendidikan di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur:

Tabel 1.1 Data jumlah TKI berdasarkan tingkat pendidikan periode Januari s/d Agustus tahun 2016 di Dusun XV Desa Bandar Agung.

No	Dusun XV	SD	Tingkat Pendidikan				Jumlah TKI
			SMP	SM A	D1- D3	S1- S3	
1.	041	2	3	2	-	-	7
2.	042	3	4	2	-	-	9
3.	043	4	5	4	-	-	13
4.	044	1	1	3	-	-	5
5.	081	2	1	2	-	-	5
JUMLAH		12	14	13	-	-	39

Sumber: Data kependudukan Desa Bandar Agung Tahun 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2016 di Dusun XV Desa Bandar Agung memiliki jumlah TKI sebanyak 39 orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu SD, SMP dan SMA. TKI tersebut tersebar di beberapa negara diantaranya Arab Saudi, Kuwait, Korea, Taiwan, Malaysia dan Hongkong. Dari 39 orang yang menjadi TKI, paling banyak berada di negara Timur Tengah yaitu berjumlah 20 orang, dan sisanya tersebar di berbagai negara. Faktor-faktor penyebab banyaknya TKI di desa ini adalah banyaknya jumlah penduduk di Desa Bandar Agung yang memasuki usia angkatan kerja, namun dengan latar belakang pendidikan yang rata-rata masih rendah, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kebijakan pemerintah mengenai penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat dengan melakukan penelitian di Dusun XV Desa Bandar Agung dan penulis akhirnya melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman tenaga

kerja Indonesia Terhadap Sikap Masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Banyaknya kasus-kasus yang dialami TKI seperti kekerasan, pelecehan seksual dan tidak kesesuaian gaji yang diberikan oleh majikan.
2. Upaya pemerintah untuk membenahi sistem perlindungan para pekerja informal di luar negeri yang masih kurang maksimal.
3. Banyaknya PJTKI-PJTKI ilegal yang terus saja bisa beroperasi tanpa kontrol.
4. Upaya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah.
5. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman TKI Terhadap Sikap Masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas maka masalah dibatasi pada pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI ke 19 negara terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

1.6 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Untuk memperkaya konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, dalam kajian pendidikan yang berkaitan dengan hukum dan kemasyarakatan.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan pemerintah untuk membenahi kinerja pemerintah dan

memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri serta agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan agar masyarakat yang hendak menjadi TKI untuk lebih selektif untuk memilih perusahaan jasa pengiriman TKI. Selain itu untuk memotivasi masyarakat agar meningkatkan keterampilannya supaya mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Selain sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana, penelitian ini berguna untuk memberi bekal pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti maupun calon guru dalam mendidik dengan cara memotivasi dalam diri anak didiknya bahwa pendidikan itu sangat penting agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing dengan Negara lain.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan hukum dan kemasyarakatan

khususnya tentang kebijakan pemerintah mengenai penghentian pengiriman TKI.

1.7.2 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

1.7.3 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

1.7.4 Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

1.7.5 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 05 Oktober 2016 dengan nomor 6005/UN26/3/PL/2016 sampai dengan 18 Januari 2017 dengan nomor 072/047/15.2006/01/2017.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Kebijakan

A. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya (Nevil Johnson dalam Abdul Wahab, 2016:9).

Menurut Suharto (2008:3), kebijakan adalah “sebuah instrument pemerintah bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik”. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori,

ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.

Menurut Federick dalam (Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai:

“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam kegiatan suatu masalah.

Menurut Wahab (2008:40-50), mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, beliau memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- 5) Kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang akan dicapai.
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Adanya pedoman-pedoman dari kebijakan seperti yang dijelaskan diatas, menunjukan bahwa kebijakan memiliki berbagai aturan agar sesuatu tersebut bias dikatakan sebagai suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2007:15), bahwa: “Istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti pada kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi”.

Menurut Islamy dalam (Suandi, 2010:12), “kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan”. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan didalamnya”.

Menurut Anderson dalam (Islamy, 2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan pendapat ahli maka menurut penulis bahwa kebijakan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok tertentu atau pemerintah yang mengandung unsur keputusan pemilihan dari berbagai pilihan yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dalam rangka mengatasi masalah yang ada.

B. Teori Pengambilan Keputusan

Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin dan ada pula yang tidak rutin. Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan itu dibuat. Menurut Agustino dalam Wahab (2016:75) terdapat tiga teori pengambilan keputusan. Tiga teori ini menitik beratkan pada langkah atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan keputusan diantaranya yaitu:

1) Teori Rasional Komprehensif

Barangkali teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur:

- a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan menurut prioritas masalah)
- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya/kepentingannya.
- c. Berbagai macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama.
- d. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakan untuk menentukan prioritas.
- e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain.
- f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan.

Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat-akibat dari

pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan.

2) Teori Inkremental

Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Teori ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait.
- b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marjinal.
- c. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya.
- d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan di redefinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi.
- e. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. Sehingga keputusan yang baik terletak pada

berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan.

- f. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya adalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan.

Karena diambil berdasarkan berbagai analisis maka sangat tepat diterapkan bagi negara-negara yang memiliki struktur mejemuk. Keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya diantara berbagai pihak sehingga secara politis lebih aman. Kondisi yang realistik diberbagi negara bahwa dalam mengambil keputusan/kebijakan para pengambil keputusan dihadapkan pada situasi kurang baik seperti kurang cukup waktu, kurang pengalaman, dan kurangnya sumber-sumber lain yang dipakai untuk analisis secara komprehensif.

3) Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning Theory)

Aitai Etzioni dalam Agustino (2008:15), memberikan solusi yang kemudian disebut yaitu pengamatan terpadu (*Mixid Scaning*) sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai. Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan

menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyatakan bahwa ada tiga teori dalam pemerintah merumuskan keputusan atau kebijakan diantaranya yaitu teori rasional komprehensif, teori inkremental dan teori pengamatan terpadu (*Mixed Scanning Theory*). Dari ketiga teori tersebut dalam penelitian ini, kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI menggunakan teori pengamatan terpadu, yaitu dengan menggabungkan dua teori yaitu teori rasional komprehensif dan teori inkremental dengan cara melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi, lalu memilih permasalahan yang paling penting dan harus ditemukan solusinya, selanjutnya menentukan pedoman atau aturan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bisa jadi dengan cara memperbaiki kebijakan yang sudah ada, seperti dalam kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI, sebelumnya sudah diterapkan tentang kebijakan untuk melindungi TKI namun kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia.

C. Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman TKI (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015)

Ada berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu penghentian pengiriman TKI ke 19 negara khususnya di Negara kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut diantaranya yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Jordania.

Kebijakan tersebut memuat tentang Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 yang menetapkan beberapa pertimbangan yakni:

- a. Bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut
- b. Bahwa penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Berikut ini merupakan isi dari keputusan menteri tersebut:

1. Penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada penggunaan perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah (Bagian 1 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
2. Tenaga kerja Indonesia yang telah bekerja dinegara-negara kawasan timur tengah pada saat keputusan menteri ini diberlakukan, maka tenaga kerja Indonesia tetap dapat bekerja sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja (Bagian 2 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
3. Bagi tenaga kerja Indonesia yang masih bekerja di kawasan timur tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang (Bagian 3 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
4. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini maka semua kebijakan yang terkait dengan penghentian penempatan tenaga kerja Indonesia ke negara tujuan penempatan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Keputusan Menteri ini (Bagian 4 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
5. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Bagian 5 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).

6. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut maka menurut penulis bahwa penghentian dan larangan pengiriman TKI pada penggunaan perseorangan yaitu pekerja informal yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Negara kawasan Timur Tengah.

Kebijakan penghentian dan larangan pengiriman tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara kawasan timur tengah juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang dijelaskan bahwa: “Penetapan penghentian dan pelarangan penempatan TKI ditetapkan oleh Menteri”(pasal 36 ayat (1) PP Perlindungan TKI).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka menurut penulis bahwa tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk membenahi sistem perlindungan para pekerja informal di luar negeri. Sehingga, tidak ada lagi TKI yang dihukum mati karena budaya negara setempat yang mempersulit tindakan perlindungan terhadap para pekerja migran yang bekerja pada sektor domestik. Sesuai dengan isi dari kebijakan pemerintah tersebut, peneliti

ingin menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap sikap masyarakat.

2.1.2 Tinjauan Tentang Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Indonesia Serta Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia.

A. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak istilah pekerja. Misalnya ada yang menyebutnya: buruh, karyawan atau pegawai namun sesungguhnya dapat dipahami bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut adalah sama yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya (Darwan, 2000:20). UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan pengertian ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga Simanjuntak dalam (Lalu Husni,2012:27).

Berdasarkan pengertian tersebut maka menurut penulis bahwa tenaga kerja adalah orang yang sudah atau sedang bekerja maupun sedang mencari kerja dan berharap mendapatkan upah sebagai imbalannya.

B. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Secara umum pengertian tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur Penempatan

TKI dengan menerima upah. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah:

“Baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar”.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian tenaga kerja Indonesia maka menurut penulis bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja

di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka menurut penulis calon TKI adalah setiap warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan sudah terdaftar sebagai calon pekerja di luar negeri.

C. Hak dan Kewajiban TKI atau Calon Tenaga Kerja Indonesia.

1. Hak calon Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Zaeni Asyadie (2007:204), Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;

- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

2. Kewajiban Calon TKI

Setiap calon TKI atau TKI mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan republik indonesia di negara tujuan.

D. Syarat Tenaga Kerja Indonesia

Adanya TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah:

“Suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu” (Endang Sulityaningsih dan Yudo Swasono, 1993:7).

Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan kebijaksanaan dan program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya (Suroto, 1986:8). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan di pekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Selain itu ada syarat Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon TKI juga wajib memiliki dokumen –dokumen, yaitu :

- 1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 2) surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto kopi buku nikah
- 3) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- 4) sertifikat kompetensi kerja;
- 5) surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- 6) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- 7) visa kerja;
- 8) perjanjian penempatan kerja;
- 9) perjanjian kerja, dan
- 10) KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep tenaga kerja Indonesia serta hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, bahwa sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban TKI beserta syarat-syarat menjadi TKI namun masih ada oknum yang melanggar, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai masala. Sehingga perlunya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan.

E. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan tenaga kerja dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/MEN/1994 adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses Antar Kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri (huruf (a)). Sedangkan Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya (huruf b). Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (huruf c). Sesuai Pasal 2 PER-02/MEN/1994 untuk melaksanakan penempatan tenaga Kerja di dalam dan di luar negeri harus menaati ketentuan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja (Pasal 3) dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, pemasukan devisa, perluasan lapangan kerja, dan keberhasilan usaha jasa penempatan tenaga kerja. Untuk itu harus diperhatikan harkat dan martabat bangsa dan negara

melalui pendayagunaan penempatan pasar kerja di dalam dan di luar negeri. Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memiliki Surat Izin Usaha (SIU-PJTKI) untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan keluar negeri. Lembaga pelaksanaan penempatan tenaga kerja melaksanakan tugas kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses Antar Kerja, baik di dalam dan atau di luar negeri.

Adapun hak-hak dari lembaga pelaksanaan penempatan tenaga kerja sesuai dengan status dan persyaratan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menempatkan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri.
- 2) Menyediakan tenaga kerja yang diperlukan Pengguna Jasa baik di dalam maupun luar negeri.
- 3) Memperoleh informasi pasar kerja dari dalam dan ke luar negeri.
- 4) Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Departemen Tenaga Kerja
- 5) Mendapat biaya jasa penempatan dari pengguna jasa di dalam maupun luar negeri.
- 6) Mendapat biaya jasa penempatan dari tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Mengelola bank data tenaga kerja yang terampil atau berpengalaman.

Adapun kewajiban pelaksana penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penempatan tenaga kerja.
- 2) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
- 3) Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dari Departemen Tenaga Kerja.
- 4) Menyiapkan Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas dalam segi mental, fisik, keterampilan teknis dan kemampuan berkomunikasi.
- 5) Melaksanakan promosi dan pemasaran Jasa TKI.
- 6) Melaporkan setiap penempatan, pemberangkatan dan pemulangan TKI kepada Departemen Tenaga Kerja secara berkala dan insidental untuk hal yang khusus.
- 7) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja mulai dari pra sampai dengan purna penempatan, termasuk pengamanan pelaksanaan perjanjian kerja yang mengikat Pengguna Jasa TKI.
- 8) Membuat laporan usaha dalam bentuk laporan semesteran dan laporan tahunan harus diaudit oleh Akuntan Publik. PJTKI dapat melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja untuk suatu paket kontrak pekerjaan penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja. Untuk itu PJTKI harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja atas nama Menteri. Untuk mendapatkan persetujuan itu PJTKI harus mengajukan permohonan tertulis dengan meterai cukup. Permohonan

ditujukan kepada Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja, dengan melampiri:

- 1) Perjanjian antara PJTKI dengan Badan Hukum Pemberi Kerja yang memuat pemberian tugas, hak dan kewajiban untuk melaksanakan penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja yang diperlukan.
- 2) Perjanjian kerja antara PJTKI dengan tenaga kerja yang akan ditempatkan, yang memuat syarat dan kondisi kerja serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 3) Surat pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi dalam penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan tenaga kerja yang telah mendapat persetujuan harus memenuhi ketentuan yaitu:

- 1) Laporan pemberangkatan dan kepulangan tenaga kerja.
- 2) Program pengiriman remittan dan tabungan bagi tenaga kerja yang bekerja diluar negeri.
- 3) Tanggung jawab perlindungan tenaga kerja.

PJTKI baik sendiri atau berkelompok dapat menunjuk perwakilan Luar Negeri untuk mengurus kepentingannya di negara penempatan tenaga kerja. Bila dipandang perlu Perwakilan Luar negeri harus memiliki karyawan yang dapat berbahasa Indonesia.

Perwakilan luar negeri yang memenuhi persyaratan tersebut harus dilaporkan kepada Perwakilan RI setempat.

2.1.3 Tinjauan Tentang Sikap

A. Pengertian Sikap

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Menurut Sarnoff (dalam Sarwono, 2009:81) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi (*disposition to react*) secara positif (*favorably*) atau secara negatif (*unfavorably*) terhadap obyek – obyek tertentu.

Menurut Djaali (2008:114) “sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Sikap bukan tindakan nyata (*overt behavior*) melainkan bersifat tertutup (*covert behavior*).”

Berdasarkan pendapat di atas sikap, maka penulis menyatakan bahwa sikap merupakan penjelmaan dari paradigma yang kemudian akan melahirkan nilai-nilai yang dianut seseorang dan sikap tersebut terbentuk sepanjang perkembangan karena sikap bukan bawaan lahir seseorang. Melainkan dari pembentukan sikap yang senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkaitan dengan objek tersebut.

Menurut Zanna & Rempel dalam Sarwono (2009:82) “sikap adalah reaksi yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang,

menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang.” Menurut Eagly & Chaiken dalam Sarwono (2009:82) “sikap adalah tendensi psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa derajat kesukaan dan ketidaksukaan.”

Kemudian menurut Thrustone dalam Bimo Walgito (2003:103) “sikap adalah suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif ialah senang, sedangkan afeksi yang negatif ialah afeksi yang tidak menyenangkan. Menurut Azwar (2013:5) “sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (unfavorable) pada objek”. Menurut Fishbein dalam Ali dan Ansori, (2006:141) “sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek.”

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang individu terhadap suatu objek tertentu, situasi atau orang lain yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah respon kognitif, afektif dan perilaku individu. Serta kesiapan seseorang bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai untuk menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu.

B. Komponen Sikap

Sikap yang dimiliki seseorang adalah suatu jalinan atau suatu kesatuan dari berbagai komponen yang bersifat evaluasi. Langkah pertama adalah keyakinan, pengetahuan, dan pengamatan. Kedua, perasaan atau feeling. Ketiga, kecenderungan individu untuk melakukan atau bertindak. Menurut Sarwono (2009:83) “sikap adalah konsep yang dibentuk oleh tiga kompone, diantaranya yaitu:

1. Komponen kognisi yang berhubungan dengan keyakinan (*beliefs*), ide dan konsep.
2. Komponen afeksi yang berhubungan dengan emosional seseorang.
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan tingkah laku.

Sedangkan Kothandapani yang dikutip oleh Azwar (2012: 24) merumuskan tiga komponen tersebut, yakni komponen kognitif (kepercayaan atau *beliefs*), komponen emosional (perasaan), dan komponen perilaku (tindakan).

Menurut Alport dalam (dalam Azwar, (2012:17) berdasarkan strukturnya membagi sikap kedalam tiga komponen yang saling berhubungan dan menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen kognitif berisi kepercayaan dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu dan merupakan hal yang dipercayai oleh subyek pemilik sikap tersebut, komponen afektif merupakan komponen perasaan yang menyangkut aspek emosi,

komponen konatif merupakan komponen aspek kecenderungan perilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subyek.

Sedangkan menurut Sears dalam Widyastuti (2014:59), terdiri atas:

- 1).Komponen *kognitif* dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang mengenai obyek tersebut bersifat evaluatif yang melibatkan diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap obyek.
- 2).Komponen Perasaan dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang berkaitan dengan obyek tersebut. Obyek tersebut dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. Beban emosional inilah yang memberikan watak tertentu terhadap sikap yaitu watak mantap, tergerak dan termotivasi.
- 3).Komponen Kecenderungan Tindakan dalam suatu sikap mencakup semua kesiapan perilaku yang berkaitan dengan sikap. Jika seseorang individu bersikap positif pada obyek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau memuji/ mendukung obyek tersebut. Jika bersikap negatif ia akan cenderung mengganggu atau menghukum atau merusak obyek tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap terdiri atas komponen kognitif, afektif dan *behavior*.

C. Ciri-ciri Sikap

Sikap merupakan suatu kecenderungan yang dapat mendorong dan menimbulkan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku seseorang terhadap objek tertentu. Meskipun demikian, sikap memiliki segi

perbedaan dengan pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri manusia, seperti set, kebiasaan, motivasi dan minat. W.A. Gerungan (2009: 153) mengemukakan bahwa : “untuk dapat membedakan antara attitude, motif kebiasaan dan lain-lain, faktor psychis yang turut menyusun pribadi orang, maka telah dirumuskan lima buah sifat khas dari pada attitude”. Adapun ciri-ciri sikap itu adalah:

- a. *Attitude* bukan dibawa orang sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan objeknya.
- b. *Attitude* itu dapat berubah-ubah.
- c. *Attitude* tidak berdiri sendiri melainkan senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap objek.
- d. Objek *attitude* kumpulan dari hal-hal tertentu.
- e. *Attitude* itu mempunyai segi-segi motivasi dan segi perasaan, sifat inilah yang membedakan attitude dari pada kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Menurut Novi (2015:28) ciri-ciri sikap adalah:

- a). Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertindak laku.
- b). Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis atau kategori dalam hal ini skema yang dimiliki orang menentukan bagaimana mereka mengkategorisasikan target obyek dimana sikap diarahkan.
- c). Sikap dipelajari.
- d). Sikap memengaruhi perilaku. Pengukuran sikap yang mengarah pada suatu obyek memberikan alasan untuk berperilaku mengarah pada obyek itu dengan suatu cara tertentu.

Menurut Seitel dalam Soemirat dan Yehuda dalam Novi (2015:29), sikap didasari kepada sejumlah ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

- a. Personal : Faktor secara fisik dan emosional suatu individu, termasuk ukuran fisik, umur dan status sosial.
- b. Budaya : Lingkungan dan gaya hidup dari suatu daerah geografis tertentu.
- c. Pendidikan : Tingkat dan kualitas pendidikan seseorang.
- d. Keluarga : asal-usul keluarga
- e. Agama : Suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- f. Kelas sosial : Posisi dalam masyarakat, perubahan status social seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang.
- g. Ras etnik asli

Sedangkan menurut Ahmadi (2002:178) ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut:

1). Sikap itu dipelajari (*learnability*)

Mempelajari sikap dengan sengaja bila individu itu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan.

2). Memiliki kestabilan (*Stabiity*)

Sikap dimulai dari dipelajari kemudian menjadi lebih kuat, tetap dan stabil, melalui pengalaman.

3). *Personal-societal significance*

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi.

4). *Berisi Cognisi dan affeksi*

Komponen cognisi dari pada sikap adalah berisi informasi yang faktual, misalnya objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan.

5). *Approach-avoidance directionality*

Bila seseorang memiliki sikap yang fovarable terhadap sesuatu obyek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap unfovarable, mereka akan menghindarinya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sikap yaitu sikap itu dipelajari, ditujukan kepada obyek dan memengaruhi tingkah laku.

D. Fungsi Sikap

Katz dalam Zaim Elmubarok (2008: 50) menyebutkan empat fungsi sikap yaitu:

- a. Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat yang menunjukkan bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya. Dengan demikian, maka individu akan membentuk sikap positif terhadap hal-hal yang dirasakan akan mendatangkan keuntungan dan membentuk sikap negatif terhadap hal-hal yang merugikannya.
- b. Fungsi pertahanan ego yang menunjukkan keinginan individu untuk menghindarkan diri serta melindungi dari hal-hal yang mengancam egonya atau apabila ia mengetahui fakta yang tidak mengenakkan, maka sikap dapat berfungsi sebagai

mekanisme pertahanan ego yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut.

- c. Fungsi pernyataan nilai, menunjukkan keinginan individu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang dianutnya sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya.
- d. Fungsi pengetahuan, menunjukkan keinginan individu untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran dan untuk mengorganisasikan pengalamannya.

Sedangkan Menurut Rita L. Atkinson dalam Walgito 2003:121), menyebut 5 fungsi sikap, yaitu

a. Fungsi Instrumental

Dikatakan memiliki fungsi instrumental apabila sikap yang kita pegang karena alasan praktis atau manfaat. Sikap ini semata-mata mengekspresikan keadaan spesifik keinginan umum kita untuk mendapatkan manfaat atau hadiah dan menghindari hukuman.

b. Fungsi Pengetahuan

Merupakan fungsi sikap yang membantu kita memahami dunia, yang membawa keteraturan bagi berbagai informasi yang harus kita asimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut adalah skema penting yang memungkinkan kita mengorganisasikan dan mengolah berbagai informasi secara efisien tanpa harus memperhatikan detailnya.

c. Fungsi Nilai-Ekspresif

Yaitu fungsi sikap yang mengekspresikan nilai-nilai kita atau yang mencerminkan konsep diri kita. Karena sikap nilai-ekspresif berasal dari nilai atau konsep dasar seseorang, mereka cenderung konsisten satu sama lain.

d. Fungsi Pertahanan Ego

Sikap yang melindungi kita dari kecemasan atau ancaman bagi harga diri kita. Salah satu pertahanan ego yang dijelaskan oleh Freud adalah proyeksi: individu merepresi impuls yang tidak dapat diterima kemudian mengekspresikan sikap bermusuhan kepada orang lain yang dirasakan memiliki impuls yang sama.

e. Fungsi Penyesuaian Sosial

Sikap yang membantu kita merasa menjadi bagian dari komunitas. Sampai tingkat memiliki fungsi penyesuaian sosial, sikap dapat berubah jika norma sosial berubah.

Sedangkan menurut Mar'at dalam Walgito (2003: 121) fungsi sikap sebagai berikut:

1. Sikap memiliki fungsi instrumental dan dapat menyesuaikan atau berfungsi pula memberikan pelayanan
2. Sikap dapat berfungsi sebagai penahan diri atau fungsi mengadaptasi dunia luar
3. Sikap berfungsi sebagai penerima terhadap suatu objek dan ilmu serta memberi arti
4. Sikap dapat pula menunjukkan nilai ekspresif dari diri seseorang dan menjawab suatu situasi.

Menurut Baron, Byrne, dan Branscombe dalam Walgito (2012:123), terdapat lima fungsi sikap sebagai berikut.

1. Fungsi pengetahuan

Sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai.

2. Fungsi identitas

Sikap terhadap kebangsaan Indonesia (nasionalis) yang kita nilai tinggi, mengekspresikan nilai dan keyakinan serta mengkomunikasikan “siapa kita”.

3. Fungsi harga diri

Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga diri.

4. Fungsi pertahanan diri (*ego defensive*)

Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri kita.

5. Fungsi memotivasi kesan (*impression motivation*)

Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi sikap yaitu fungsi pengetahuan, fungsi pertahanan ego, fungsi penyesuaian instrumental dan fungsi pernyataan nilai.

E. Teori Organisasi Sikap

Berikut ini merupakan beberapa teori organisasi sikap menurut Azwar 2013: 40-55):

a. Teori Keseimbangan dari Heider

Menurut Freitz Heider asumsi dasar teori ini menekankan pada adanya hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara 12 unsur-unsur individu (I), orang lain(O) dan objek sikap (Ob).

Keadaan seimbang terjadi jika hubungan antara (I), (O), dan (Ob) berjalan harmonis, sedangkan jika hubungan ketiganya tidak harmonis menyebabkan bahwa persepsi orang terhadap bentuk hubungan antara unsure (I), (O), dan (Ob) memegang peranan penting dalam menentukan keseimbangan yang terjadi. Dengan demikian menurut teori ini perubahan sikap dapat dilakukan dengan menciptakan kesamaan persepsi antara (I) dan (O) terhadap (Ob) sikap.

b. Teori Konsistensi Afektif-Kognitif dari Rosenberg

Teori ini berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat kognisinya konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan seseorang, pendirian seseorang dan pengetahuan seseorang tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya.

c. Teori Dimensi Kognitif dari Festinger

Asumsi dasar dari teori ini adalah sikap berubah demi mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Seringkali manusia dihadapkan pada adanya konflik antara berbagai kognisi, sikap, bahkan antara sikap dengan perilaku. Keadaan ini disebut *disonasi*.

d. Teori Fungsional Katz

Teori fungsional yang dikemukakan oleh Katz mengatakan bahwa untuk memahami bagaimana sikap menerima dan menolak

perubahan haruslah berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri. Apa yang dimaksud oleh Katz sebagai dasar motivasional merupakan fungsi sikap bagi individu yang bersangkutan.

F. Pengukuran Sikap

Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap idealnya harus mencakup semua dimensi tersebut, akan tetapi hal ini sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil dilakukan. Belum ada instrumen pengukuran sikap yang dapat mengungkap semua dimensi tersebut sekaligus. Banyak diantara skala yang digunakan dalam pengukuran sikap hanya mengungkapkan dimensi arah dan dimensi intensitas saja, yaitu dengan hanya menunjukkan kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran mengenai derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respons individu.

Sikap dapat diukur dengan metode atau teknik *Measurements by scales* atau pengukuran sikap dengan menggunakan skala. Menurut Arikunto (2010:182) ada beberapa bentuk skala sikap yang dapat digunakan dalam pengukuran sikap, antara lain:

1. Skala Likert

Skala ini merupakan skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset survei. Skala ini disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti respon seperti:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TB = Tidak Berpendapat

TS = Tidak Setuju

STB = Sangat Tidak Setuju

Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh diatas, terkadang digunakan juga skala dngan tujuh atau Sembilan tingkat.

2. Skala Pilihan Ganda

Skala ini bentuknya seperti soal pilihan ganda yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat.

3. Skala Thurstone, mengembangkan tiga bagian dalam penskalaan yaitu metode perbandingan-pasangan, metode interval pemunculan sama, dan metode interval berurutan.

4. Skala Guttman

Skala ini berupa tiga atau empat buah pernyataan yang masing-masing dijawab “ya” atau “tidak”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyatakan bahwa sikap dapat diukur dengan berbagai skala, diantaranya yaitu skala likert, skala pilihan ganda, skala thrustone, skla guttman. Sesuai dengan konsep sikap, peneliti ingin menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sikap masyarakat melalui indikator kognisi, afeksi dan konasi.

2.1.4 Tinjauan Tentang Masyarakat

A. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan makhluk yang selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan sekitar. Dengan adanya naluri, pikiran, hasrat, perasaan, dan keinginan, manusia memberi reaksi dan pola kehidupan dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial di hasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Pengertian masyarakat menurut Maclver dan Page dalam Soejono soekanto (2009:22) menyebutkan bahwa: “Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia”.

Menurut Auguste Comte dalam Abdulsyani (2012:31) “Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Abdulsyani (2012: 32) mengatakan bahwa: “Masyarakat merupakan kelompok manusia yang

terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama”.

Selaras dengan pendapat ahli tersebut, Burhan Bungin (2011:163) menyatakan bahwa:

“Masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah (*territorial*) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki symbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem *stratifikasi*, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.”

Berdasarkan pengertian para ahli maka menurut penulis bahwa masyarakat merupakan makhluk individu yang hidup bersama disuatu wilayah tertentu dengan adanya kontak sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan bersama.

B. Ciri-Ciri dan Syarat Masyarakat

Definisi masyarakat menimbulkan adanya syarat-syarat tertentu sehingga dapat disebut dengan masyarakat. Yaitu dengan adanya pengalaman hidup bersama dan dalam jangka waktu yang lama dan dengan adanya kerjasama antar anggota kelompok, dan dengan adanya pikiran dan perasaan bersama menjadikan kesatuan dalam kelompoknya. Pengalaman hidup bersama dan dalam jangka waktu yang lama maka menimbulkan kerjasama, dan interaksi terhadap pola tingkah laku kelompok.

Menurut Soeryono Soekanto (2012: 32) mengatakan bahwa masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

- a. Manusia merupakan manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu ciri-ciri hidup bersama.

Ciri-ciri masyarakat menurut Setiadi (2012:84) yakni:

- 1). Sekumpulan orang
- 2). Sudah terbentuk dengan lama
- 3). Sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri
- 4). Memiliki kepercayaan (nilai), sikap dan perilaku yang dimiliki bersama
- 5). Adanya kesinambungan dan pertahanan diri.
- 6). Memiliki kebudayaan.

Pendapat lain menurut Abu Ahmadi dalam Abdulsyani (2007:32) mengatakan bahwa masyarakat harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti :

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari ciri-ciri dan syarat masyarakat diatas bahwa, masyarakat bukan hanya sekumpulan

manusia belaka, tetapi diantara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan tertentu serta harus mematuhi aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa masyarakat hendaknya patuh terhadap aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan tentang penghentian pengiriman TKI.

2.2 Penelitian yang Relevan

1. Lokal

Penelitian yang dilakukan oleh Aldaova Flanopsky Erton (2012) dengan judul “Perizinan Terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Oleh PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Bandar Lampung” Universitas Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini meneliti bagaimana prosedur perizinan terhadap PT. Mitra Muda Reksa Mandiri dalam penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan penempatan TKI tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, sementara teknik analisis data yang digunakan dengan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam perizinan yang dibuat oleh PT. Mitra Muda Reksa Mandiri, empat perizinan untuk mendirikan perusahaan penempatan TKI dan dua perizinan

untuk melakukan kegiatan penempatan TKI keluar negeri. Faktor penghambat perizinan penempatan TKI ke luar negeri yaitu proses birokrasi yang berbelit-belit, jangka waktu yang cukup lama dan adanya pungutan liar oleh pihak pemberi izin.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, bedanya penulis memfokuskan pada kebijakan penghentian pengiriman TKI sedangkan penelitian ini membahas tentang perizinan penempatan TKI.

2. Nasional

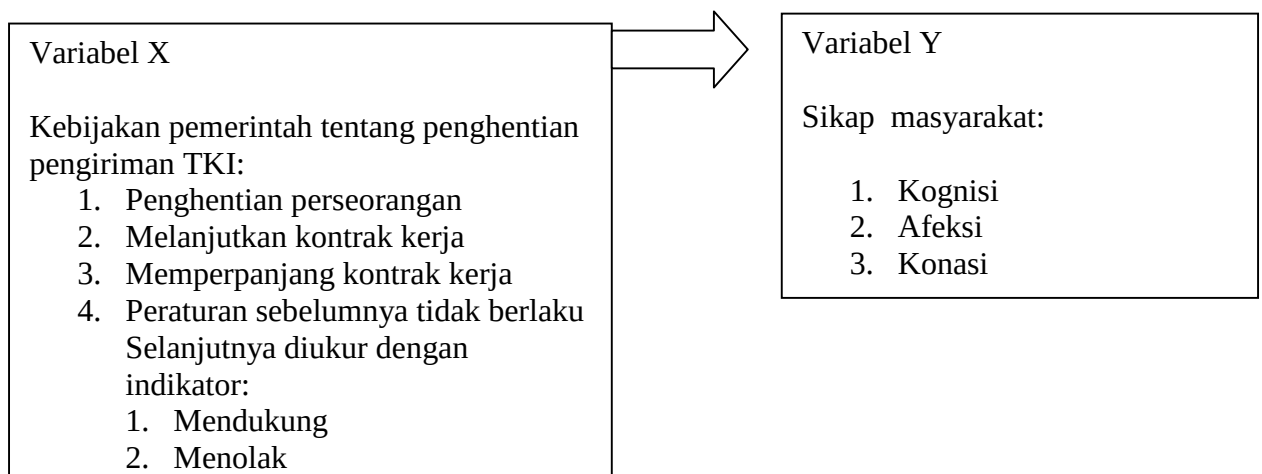
Penelitian yang dilakukan oleh Nissa Juandea (2010) dengan judul “Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi Oleh Pemerintah Indonesia” Universitas Mulawarman. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang menerangkan hubungan kausal antar fenomena dengan melakukan penyelidikan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber (Ibu Saudah, TKI asal Banjarmasin yang pernah bekerja di Arab Saudi) dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku-buku, jurnal, media massa, internet, serta sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu analisa yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang

kemudian dianalisa khususnya mengenai dampak diterapkannya kebijakan moratorium bagi Indonesia dan Arab Saudi. Penelitian ini tidak mencari atau tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian ini mencoba menganalisis dampak kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan dampak positif maupun negatif dari kebijakan tersebut. Salah satu dampak positifnya ialah: Menurunnya jumlah TKI yang bermasalah di Arab Saudi dari tahun 2010-2013, yaitu pada tahun 2010 jumlah TKI bermasalah di Arab Saudi sebanyak 31.676 orang menurun menjadi 18.977 orang. Begitu pula pada tahun 2012 dan 2013 jumlahnya kembali menurun dari 8,940 orang menjadi 3.769 orang. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan: bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman (moratorium) TKI di negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi, bedanya penulis memfokuskan pada sikap masyarakatnya, sedangkan penelitian ini membahas dampak dari kebijakan pemerintah tersebut.

2.3 Kerangka Pikir

Semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dalam hal ini khususnya masyarakat Indonesia. Seperti halnya dengan kebijakan pemerintah mengenai penghentian pengiriman TKI. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi

para TKI dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang sudah sering di alami oleh para TKI di luar negeri. Namun dari kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah baru yaitu semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Untuk itu peran dari pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena melihat kondisi di Indonesia bahwa mayoritas penduduk di negara ini berpendidikan rendah sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat. Hal ini penting karena sikap masyarakat menentukan bagaimana akan bertindak terhadap sesuatu. Untuk lebih jelasnya bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Menurut Arikunto (2010:110) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut:

HI : Ada pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

Ho : Tidak ada pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Sutrisno Badri, 2012:13). Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini karena bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan data yang ada dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan analisis dan interpretasi data yang telah diteliti pada masa sekarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada analisis data-data numerial (angka-angka) yang diolah menggunakan metode statistik (Sutrisno Badri, 2012:13).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka melalui penelitian ini peneliti akan menganalisis dan menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

3.2 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Sugiyono dalam Riduwan (2012:10) “populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun XV di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 326 jiwa.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Dusun XV di Desa Bandar Agung.

No	RT	Jumlah Penduduk
1	041	51
2	042	61
3	043	84
4	044	67
5	081	63
Jumlah		326

Sumber: Data kependudukan Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono 2016

A. Sampel

Sugiyono dalam Riduwan (2012:56) “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan peneliti dengan berpegang pada pendapat Arikunto (2010:174) yang menyatakan bahwa “untuk ancer-ancer, jika subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika

subyeknya lebih dari 100 diambil 10-15% atau 20-25% ataupun lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:”

1. Kemampuan meneliti dari waktu, tenaga dan data.
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data.
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah penduduk Dusun XV di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang akan diambil dari masing-masing dusun sebanyak 10%.

Tabel 3.2. Distribusi sampel jumlah penduduk Dusun XV di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

No	RT	Jumlah Penduduk	Sampel
1	041	10% x 51	5
2	042	10% x 61	6
3	043	10% x 84	9
4	044	10% x 67	7
5	081	10% x 63	6
Jumlah		326	33

Sumber: Data Primer Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono 2016.

Berdasarkan table diatas, sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 326 = 33$ responden. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan acak tanpa

memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut (Riduwan, 2012:58).

3.3 Variabel Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kelompok variabel yaitu:

a. Variabel bebas

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI (Y).

b. Variabel terikat

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat (X).

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian ini karena definisi itu akan mempertegas masalah yang akan diteliti:

- a. Kebijakan pemerintah mengenai penghentian pengiriman TKI adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk para TKI pada penggunaan perseorangan yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Timur Tengah.
- b. Sikap masyarakat adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif dari sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang

ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.

B. Definisi Operasional

Menurut Triyono (2013:89), “Definisi Operasional adalah proses menjabarkan konsep variabel yang bersifat umum ke dalam sejumlah dimensi yang lebih konkret dan menjabarkan setiap dimensi itu ke dalam sejumlah indikator yang lebih operasional dan lebih jelas”. Definisi Operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah mengenai penghentian pengiriman TKI adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk para TKI pada penggunaan perseorangan yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Timur Tengah.

Adapun indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kebijakan pemerintah yaitu:

1. Mendukung
 2. Menolak
- b. Sikap masyarakat adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif dari sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan. Secara operasional variabel dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI. Indikator yang diukur yaitu:

1. Kognisi (pemahaman)
2. Afeksi (kecenderungan emosional)
3. Konasi (kecenderungan bertindak)

3.5 Rencana Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah:

1. Kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI diukur dengan indikator:
 - a. Mendukung
 - b. Menolak
2. Sikap masyarakat dapat diukur berdasarkan 3 dengan indikator:
 - a. Kognisi (pemahaman)
 - b. Afeksi (kecenderungan emosional)
 - c. Konasi (kecenderungan bertindak)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid yang nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian.

A. Teknik Pokok

a. Angket Skala Likert

Untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung menggunakan

angket skala likert. Riduwan (2012:71) mengatakan “angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna”. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala (Ahmadi, 2002:186) :

- 1). Sangat Setuju
- 2). Setuju
- 3). Netral
- 4). Tidak Setuju
- 5). Sangat Tidak Setuju

Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan. Tujuan penyebaran angket skala likert adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pernyataan. Sasaran angket dalam penelitian ini adalah disebar pada kepada masyarakat di Dusun XV desa Bandar agung sebagai responden guna untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Tujuan dari pemberian angket ini untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap

kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

B. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan melengkapi data yang tidak ada dalam angket. Melalui wawancara maka akan diketahui keadaan yang sebenarnya dilapangan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap (kognisi, afeksi dan konasi) masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis tentang keadaan masyarakat berupa pendidikan dan keadaan ekonomi, jumlah TKI di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Sumber data ini diperoleh dari monografi desa Bandar Agung dan jumlah TKI di Kantor Kecamatan Bandar Sribhawono.

c. Observasi

Teknik ini digunakan untuk melihat keadaan tempat penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fokus penelitian yaitu sikap masyarakat tentang kebijakan penghentian

pengiriman TKI di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Uji validitas menurut Arikunto dalam Riduwan (2012:97) “validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur”. Sedangkan menurut Sugiyono dalam Riduwan (2012:9) “ validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.”

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah *logical validity*, yaitu dengan mengonsultasikan kepada dosen pembimbing, berdasarkan konsultasi tersebut diadakan perbaikan.

B. Uji Reliabilitas

“Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik” (Arikunto, 2010:170). Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik dengan teknik belah dua.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap
3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasi dengan *Product Moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara gejala x dan y

X = Skor gejala x

Y = Skor gejala y

N = Jumlah sampel

(Riduwan, 2012:98)

Kemudian untuk mengetahui reliabilitas seluruh kuisioner digunakan rumus *Sperman Brown* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien reliabilitas seluruh tes

r_{gg} : Koefisien korelasi item x dan y

Kriteria reliabilitas menurut Manase mallo (1985:139) adalah sebagai berikut:

0,90-1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50-0,89 = Reliabilitas sedang

0,00-0,49 = Reliabilitas rendah

3.8 Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif yang diperoleh dari analisis tabel dan presentase, yang selanjutnya diuraikan dalam beberapa keterangan atau kalimat.

Untuk mengelola dan menganalisis data, akan digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1992:12) yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya presentase

F = Jumlah alternatif seluruh item

N = Jumlah perkalian antar item dan responden

Teknik untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan rumus Chi Kuadrat yaitu:

$$X^2 = \sum \frac{(fo-fe)^2}{fe}$$

(Riduwan, 2012:132)

Keterangan:

X^2 : Nilai chi kuadrat

fo : frekuensi yang di observasi (empiris)

fe : frekuensi yang diharapkan (teoritis)

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data tersebut sebagai bahan perhitungan, dengan terlebih dahulu menggunakan banyaknya gejala yang diharapkan terjadi dengan rumus:

$$fe = \frac{(\sum fk \times \sum fb)}{\sum T}$$

(Riduwan, 2012:132)

Keterangan:

fe : frekuensi yang diharapkan

$\sum fk$: jumlah frekuensi pada kolom

$\sum fb$: jumlah frekuensi pada baris

$\sum T$: jumlah kesusluhan baris atau kolom

Dengan kriteria uji sebagai berikut:

- Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima.

- b. Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi sebagai berikut:

$$c = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

(Novi, 2015:46)

Keterangan:

c : koefisien kontigensi

x^2 : Chi Kuadrat

n : jumlah sampel

Agar C dapat digunakan untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor di atas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang biasa terjadi maka harga maksimum ini dapat dihitung dengan rumus:

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan:

C_{maks} : Koefisien kontigensi maksimum

M : harga maksimum antara baris dan kolom

M : bilangan konstan

(Novi, 2015:46)

Semakin dekat harga C pada C maksimum maka semakin besar derajat asosiasi antara variabel.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian pengaruh hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Maksudnya pemahaman masyarakat tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI kurang dipahami oleh masyarakat, akibatnya masyarakat cenderung menolak, masyarakat juga merasa dirugikan akibat diberlakukannya kebijakan tersebut, walaupun mereka juga menyadari bahwa kebijakan tersebut diberlakukan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan penghentian pengiriman TKI maka perlu adanya sosialisasi tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut. sosialisasi ini bisa dilakukan oleh dinas tenaga kerja atau pemerintah terkait.

2. Untuk mengatasi masih banyaknya pengiriman TKI ilegal maka perlu diberikan sanksi kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) agar tidak melakukan kecurangan dalam pengiriman TKI dan lebih membenahi sistem kinerjanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, tujuannya agar perlindungan TKI dari dalam negeri maupun luar negeri benar-benar ditegakkan.
3. Agar tidak tertipu oleh para calo atau sponsor yang merekrut para TKI dengan cara ilegal, masyarakat harus lebih hati-hati dan tidak mudah terpancing oleh rayuan dari calo-calo tersebut.
4. Untuk menghindari kasus pelanggaran HAM, masyarakat Indonesia khususnya perempuan hendaknya tidak pergi ke luar negeri dengan menjadi TKI informal, karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lebih banyak menimpa kaum perempuan yang bekerja pada sektor formal. Jika memang harus menjadi TKI alangkah baiknya dengan cara legal, untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ali dan Ansori. 2008. *Psikologi Remaja*: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta: Yogyakarta
- Asyadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 2013. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Badri, Sutrisno. 2012. *Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Djaali. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Erton, F Aldaova. 2012. *Perizinan Terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Oleh PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Bandar Lampung*. (Skripsi) Tidak Diterbitkan.
- Fachriyah, N Novi. 2015. *Pengaruh Sikap Masyarakat Terhadap Konflik Antar Suku Disekitar Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan*. (Skripsi) Tidak Diterbitkan.
- Fikri, Ahmad. 2016. *Moratorium PRT ke Luar Negeri Telah Dilakukan*. <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/13/078770798/moratorium-prt-ke-luar-negeri-telah-dilakukan>. Diakses Pada Tanggal 26 September 2016.
- Gultom, Aldi. 2011. *Pembebasan Darsem Bukti Bahwa Pemerintah Harus Bekerja Keras* [online] <http://www.RMOL.co.read//2011/07/13/32919tkw.shtml>. Diakses Pada Tanggal 26 September 2016.
- Hadi, Sutrisno. 1992. *Metode Research II*. Yayasan Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta

- Husni, Lalu. 2012. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Juandea, Nissa. 2010. *Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi Oleh Pemerintah Indonesia*. ejournal.hi.fisip-unmul.org. diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016
- Islamy, M Irfan. 2009. *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dan Manajemen Publik* Malang: PDIA FIA-UB.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2002
- Prima, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Sarwono, W Sarlito. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sekretaris Negara. 2013. Peraturan Pemerintah Pasal 36 Ayat (1) Nomor 3 Tahun 2013
- Sekretaris Negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2)
- Sekretaris Negara. 2004. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Simamora, Bilson. 2008. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sinaga, S Rudi. 2013. *Pengantar ilmu politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 2009. *Teori Dan Kebijakan Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.